

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2008 – 2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat adalah :

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat

lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

- Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis *e-government*, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.
- Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
- Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

3.2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Jawa Barat dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktifitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah, melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20 % pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi secara bertahap seperti aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi.

Misi Pertama, **Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.**

Tujuan :

1. Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja masyarakat Jawa Barat,
2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran :

1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencaangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;
3. Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak;
4. Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan;
5. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
6. Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
7. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama;
8. Berkembangnya implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
9. Meningkatnya sikap saling menghargai dan menghormati antar berbagai komunitas budaya.

Misi Kedua, **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.**

Tujuan :

Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Sasaran :

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;
2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
3. Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing;
4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Misi Ketiga, **Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.**

Tujuan :

Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa;
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).

Misi Keempat, **Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.**

Tujuan :

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Sasaran :

1. Terkendalinya pertumbuhan dan persebaran penduduk;
2. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana;
3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat;

4. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;
5. Meningkatnya ketersediaan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Misi Kelima, **Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.**

Tujuan :

1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;
5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
6. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
7. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;
8. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik;
9. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik.

Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. *Good Governance* (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;

3. *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.
5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (Satu Data dan Informasi Jawa Barat) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan Informasi tersebut terdiri dari data dan informasi Spasial (keruangan) dan A Spasial.

3.3. Keterkaitan Visi-Misi dengan Urusan Wajib dan Pilihan

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja. Dilain pihak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dapat memaksimalkan perannya berdasarkan kewenangannya, berupa urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan pada pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu, keterkaitan antara misi Provinsi Jawa Barat dan urusan pemerintah yang dilimpahkan pada pemerintah provinsi harus dilakukan secara sinergis dan optimal.

Dalam pelaksanaan **misi pertama**, yaitu mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing, urusan wajib yang terkait adalah pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, budaya, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Pada pelaksanaan **misi kedua**, yaitu meningkatkan

pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, kewenangan pemerintah provinsi berada pada urusan wajib, yaitu perencanaan pembangunan, penanaman modal/investasi, koperasi dan usaha kecil, tenaga kerja, ketahanan pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika. Selain itu, dalam pelaksanaan misi kedua tersebut terdapat urusan pilihan yang terkait dalam pelaksanaannya yaitu urusan terkait bidang kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, industri, perdagangan, dan pariwisata. **Misi ketiga**, yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, urusan wajib yang terkait adalah pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, penanaman modal, tenaga kerja, perhubungan, lingkungan hidup, dan pertanahan. Untuk pelaksanaan **misi keempat**, yaitu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, urusan wajib pemerintah provinsi terkait pada urusan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perencanaan pembangunan, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan serta pada urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral dan transmigrasi. Pada pelaksanaan **misi kelima**, yaitu meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi, pemerintah berwenang menangani urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan wajib perencanaan pembangunan, penanaman modal, kearsipan, statistik, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat desa, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta urusan wajib bidang komunikasi dan informatika.

3.4. Indikator Kinerja Pembangunan

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Jawa Barat selama periode waktu tahun 2008 – 2013, ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan yang terdiri dari Indikator Kinerja Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah dan Indikator Kinerja Kepala Daerah.

3.4.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Jawa Barat dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan di Jawa Barat. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi

dari target pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2013. Indikator kinerja pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2007	Target Midterm	Target 2013
MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan Berdaya Saing				
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,5 tahun	9 - 9,5 tahun	10 - 10,5 tahun
2	Angka Melek Huruf	95,32%	95 - 96%	97 – 98%
3	Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH)	40,26/1.000 KH (2006)	35-36/1.000 KH	33-34/1.000 KH
4	Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)	321/100.000 KH (2003)	215-220/100.000 KH	205-210/100.000 KH
5	Indeks Pembangunan Gender	60,8 (2006)	64-65	66-67
6	Indeks Pemberdayaan Gender	54,4 (2006)	65-66	69-70
MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,41% per tahun	6 – 6.5% per tahun	6,5 – 7% per tahun
2	Daya Beli Masyarakat	Rp. 623.526,-	Rp. 635.000,- - Rp 637.000,-	Rp. 644.000,- - Rp 646.000,-
3	Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku	16,5%	14-16%	13 - 15%
4	Indeks Gini	0,21	0,19-0,20	0,18 – 0,19
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	54,73%	55-56%	56-57%
MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah				
1	Tingkat Kemantapan Jalan	87,31%	91-92%	93-94%
2	Intensitas Tanam Padi	190%	194-198%	Lebih dari 200%
3	Rasio elektrifikasi perdesaan	99,59%	100%	100%
4	Rasio elektrifikasi rumah tangga	60,41%	67-69%	71-73%
5	Cakupan pelayanan persampahan (perkotaan)	53%	57-62%	65-70%
6	Cakupan pelayanan air bersih (perkotaan)	45%	50-55%	60-65%

7	Cakupan pelayanan air limbah (domestik perkotaan)	51%	56-61%	67-72%
MISI KEEMPAT : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan				
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,84%	1,7-1,8%	1,6 – 1,8%
2	Tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar	status mutu cemar berat	status mutu cemar sedang	status mutu cemar ringan
3	jumlah hari dengan kualitas udara perkotaan katagori baik	20 hari baik/tahun	27-30 hari baik/tahun	32-35 hari baik/tahun
4	Kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung	27%	30-31%	34-35%
5	Jumlah penerapan energi alternatif	N/A	Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas	Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas
MISI KELIMA : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Demokrasi				
1	Skala kepuasan masyarakat (skala 1-4)	N/A	2	3
2	Skala Komunikasi Organisasi (skala 1-7)	N/A	4	5
3	Jumlah Angka kriminalitas	N/A	Menurunnya angka kriminalitas	Menurunnya angka kriminalitas
4	Jumlah kasus korupsi	N/A	Menurunnya jumlah kasus korupsi	Menurunnya jumlah kasus korupsi
5	Tingkat partisipasi pemilih	67-70%	75-78%	Meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada 2013 lebih besar dari 78 %

Keterangan : N/A = data tidak tersedia

3.4.2. Indikator Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Indikator Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Jawa Barat dilihat dari sisi kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang langsung dipertanggung-jawabkan kepada Presiden. Adapun tugas dan wewenangnya adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mengukur kinerja dari tugas dan wewenang tersebut, maka ditetapkan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Tugas dan wewenang	Indikator kinerja	Tahun 2007	Target Midterm	Target 2013
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota	1. Jumlah perda kabupaten/kota yang dievaluasi	N/A	30	40
		2. Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang	N/A	20%	15%
2	Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Provinsi dan Kab/Kota	1. Persentase kesesuaian substansi dokumen perencanaan kab/kota dengan provinsi	N/A	Minimal 60% substansi dokumen perencanaan kab/kota sesuai dengan provinsi	Minimal 75 % substansi dokumen perencanaan kab/kota sesuai dengan provinsi
		2. Tingkat kesesuaian kebijakan pembangunan kab/kota dengan provinsi	N/A	Minimal 70% kebijakan pembangunan kab/kota sesuai dengan provinsi	Minimal 80% kebijakan pembangunan kab/kota sesuai dengan provinsi
3	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi dan Kab/Kota	1. Tingkat pencapaian pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi	N/A	65%	75%
		2. Tingkat pencapaian pelaksanaan tugas pembantuan di kab/kota	N/A	65%	75%

Sumber : Pasal 38 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Keterangan : N/A = data tidak tersedia

3.4.3. Indikator Kinerja Gubernur sebagai Kepala Daerah

Indikator Kinerja Kepala Daerah merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Jawa Barat dilihat dari sisi kinerja Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam kerangka Otonomi Daerah.

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud, maka ditetapkan 95 Program Pembangunan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja program selama periode 2008-2013 yang terdapat pada buku dua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013.